



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOMISI IX DPR RI**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 10 (Sepuluh)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Ketenagakerjaan RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 27 Maret 2017
Pukul	: 14.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Pelaksanaan penyerapan Anggaran Tahun 2016; 2. Langkah Strategi Pemerintah Terhadap Hasil Deklarasi Bersama G-20 Bidang Ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas ketenagakerjaan; 3. Tindak lanjut penyelesaian masalah TKA terkait penggunaan mata uang <i>yuan</i> sebagai alat transaksi TKA asal China; 4. Perkembangan Penyelesaian pekerja PT. Freeport Indonesia pasca kebijakan Pemerintah merubah kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus; 5. Penjelasan terkait hasil monitoring dan evaluasi moratorium TKI sejak Tahun 2009.
Ketua Rapat	: DR. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, S.H./ Kepala Bagian Rapat Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl.Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Hadir	: A. 25 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI, 2 orang Anggota Izin; B. Menteri Ketenagakerjaan RI beserta beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

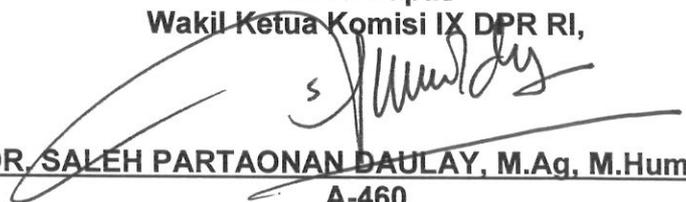
Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan dibuka pukul 14.25 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib Pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI menyampaikan apresiasi atas penyerapan anggaran Tahun 2016 dan meminta untuk meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkorelasi dengan penyerapan anggaran sehingga dapat dimaksimalkan terutama untuk program yang lebih berpihak kepada rakyat di daerah.
2. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk menjalankan komitmen Deklarasi G20 bidang ketenagakerjaan sehingga seluruh substansi pokok dalam deklarasi tersebut antara lain, tenaga kerja muda, dan tenaga kerja muda yang berisiko tidak terserap dalam pasar kerja secara permanen, revitalisasi, rebranding dan reorientasi BLK, pelatihan wirausaha, dapat dirasakan manfaatnya bagi pekerja pada tahun 2025.
3. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan pelayanan terhadap pekerja migran dengan mengembangkan infrastruktur di desa migran produktif, antara lain teknologi informasi terutama informasi permintaan kerja yang mudah diakses oleh masyarakat pada masa pra penempatan dan purna penempatan.
4. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk membuat roadmap guna menciptakan tenaga kerja yang berketrampilan sesuai dengan kebutuhan (*link & match – Demand Driven*) dan meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi RI dan Kementerian Perindustrian RI.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk menyelesaikan MoU penempatan dan perlindungan TKI ke Timur Tengah dan meningkatkan pengawasan termasuk menindak pelaku penempatan tenaga kerja Indonesia non-prosedural yang masih terjadi hingga saat ini.
6. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk menjalankan Hasil Rekomendasi Panja Pengupahan Komisi IX DPR RI dengan melakukan revisi terhadap PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
7. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI sebelum Senin, 3 April 2017.

Rapat diakhiri pukul 17.45 WIB

Ketua Rapat/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,


DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, MA
A-460